

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemusiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang merata. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk dengan jumlah yang banyak di dunia, hal ini membuat para ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan terus meningkatnya perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk tersebut yang jika dibekali pendidikan kepada masyarakat sebelum menjadi tenaga kerja sehingga memungkinkan masyarakat mempunyai keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu, penambahan penduduk dengan

kualitas sumberdaya yang bagus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap meningkat (Kompasiana, 2019).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, namun jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tinggi. Hal tersebut menjadi suatu masalah yang belum dapat teratasi karena kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kreatifitas masyarakat dalam bekerja agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Semakin tinggi keahlian dan kreatifitas yang dimiliki maka akan meningkatkan produktivitas kerja. Maka dari itu sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang baik akan menjadi modal utama untuk memperoleh pekerjaan sedangkan orang yang tidak mampu bersaing akan tersingkir dan menjadi pengangguran (Kemenperin, 2017).

Demi meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan, pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pemerintah harus mampu meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan keahlian karena ini merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan, nantinya mampu menghasilkan produksi untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mengurangi jumlah pengangguran karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah tenaga kerja yang terserap akan meningkat.

Angkatan kerja merupakan penduduk yang memasuki usia kerja yaitu 15-64 tahun yang sudah memiliki pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan (BPS, 2022). Jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat disetiap tahunnya. Jumlah tingkat penyerapan tenaga kerja yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan angka tenaga kerja yang terserap disetiap tahunnya. Berikut adalah data Penduduk Bekerja di Indonesia tahun 2010-2021 :

Tabel 1  
Data Penduduk Bekerja  
Di Indonesia Tahun 2010-2021  
(Ribuan)

<b>TAHUN</b>	<b>BEKERJA (orang)</b>	<b>ANGKATAN KERJA (orang)</b>	<b>PRESENTASE TERSERAP (%)</b>
2010	108.207.767	116.527.546	92,86%
2011	107.416.309	116.097.701	92,52%
2012	112.504.868	119.849.734	93,87%
2013	112.761.072	120.172.003	93,83%
2014	114.628.026	121.872.931	94,06%
2015	114.819.199	122.380.021	93,82%
2016	118.411.973	125.443.748	94,39%
2017	121.022.423	128.062.746	94,50%
2018	126.282.186	133.355.571	94,70%
2019	128.755.271	135.859.695	94,77%
2020	128.454.184	138.221.938	92,93%
2021	131.050.523	140.152.575	93,73%

Sumber : Bps.go.id tahun 2010-2021.

Diketahui tabel 1 menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2010 sebesar 116.527.546 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 116.097.701 jiwa. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 119.849.734 jiwa, kemudian 2013 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja terjadi perubahan kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal. Pemerintah harus terus berupaya agar penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, Upah juga sebagai salah satu indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan seorang tenaga kerja dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 adalah hak bagi para pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atas perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan sebagai tunjangan bagi para pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Di Indonesia upah minimum terus mengalami peningkatan, hal tersebut merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah sebagai standar acuan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum regional. Setiap daerah memiliki kondisi upah minimum yang berbeda-beda. Kenaikan tingkat upah harus diiringi dengan peningkatan kualitas pekerja sehingga produksi terus meningkat (Siregar, 2014).

Tabel 2  
Data Rata-Rata Upah Minimum Provinsi (UMP)  
di Indonesia Tahun 2010-2021  
(Rupiah)

TAHUN	UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)
2010	908.824
2011	988.829
2012	1.088.903
2013	1.296.908
2014	1.506.231
2015	1.790.342
2016	1.997.819
2017	2.142.855
2018	2.268.874
2019	2.455.662
2020	2.672.371
2021	2.687.724

*Sumber : Bps.go.id tahun 2010-2021.*

Pada Tabel 2 Upah Minimum Provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut didasari karena adanya peningkatan kebutuhan pokok masyarakat Dimana upah digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pemerintah menetapkan jumlah besaran upah tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Penetapan Upah Minimum berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Komponen dasar dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu mencakup keterampilan dan kesehatan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Semakin tingginya kualitas hidup

manusia maka akan menunjang peningkatan produktivitas barang dan jasa yang akan dihasilkan, dengan begitu semakin tinggi IPM akan mempengaruhi tenaga kerja dalam mencari pekerjaan. Indeks Pembangunan Manusia di bentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Berikut merupakan data IPM di Indonesia tahun 2010-2021:

Tabel 3  
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
di Indonesia Tahun 2010-2021  
(Persen)

TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
2010	72,27
2011	72,77
2012	67,70
2013	68,31
2014	68,90
2015	69,55
2016	70,18
2017	70,81
2018	71,39
2019	71,92
2020	71,94
2021	72,29

Sumber : Bps.go.id tahun 2010-2021.

Dari data yang di dapatkan pada Tabel 3. IPM dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan dari 72,27 menjadi 72,77 namun pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 72,77 menjadi 67,70. Pada tahun 2013 IPM di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,70 menjadi 68,31 kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 72,29. Kenaikan

peningkatan IPM menunjukkan bahwa adanya tingkat kesejahteraan yang juga meningkat.

Selain IPM dan UMP, PDRB juga memiliki keterkaitan dengan Penyerapan tenaga kerja yaitu jika semakin meningkat PDRB maka akan semakin meningkat juga jumlah penyerpan tenaga kerja yang terserap. Maka dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja akan meningkat jika output barang dan jasa atau PDRB juga meningkat. Data PDRB di Indonesia tahun 2010-2021 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4  
Data Produk Domestik regional Bruto Harga Konstan  
di Indonesia Tahun 2010-2021  
(Milyar Rupiah)

Tahun	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
2010	2222986,86
2011	7286914,79
2012	7735785,46
2013	8179836,67
2014	8605809,67
2015	8982517,10
2016	9434613,40
2017	9912928,10
2018	10425851,90
2019	10949155,40
2020	10723054,80
2021	11118868,50

*Sumber : Bps.go.id tahun 2010-2021.*

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh unit

ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu (BPS, 2022). Data Produk Domesik Regional Bruto di atas adalah berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. PDRB ini untuk menilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian secara keseluruhan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, perubahan PDRB yang terjadi setiap tahunnya hanya mencerminkan perubahan jumlah yang diproduksi. Jumlah PDRB yang besar menunjukkan jumlah produksi yang dilakukan suatu wilayah semakin banyak sehingga membutuhkan jumlah tenaga kerjayang semakin besar. Dari tabel 4 yang menjelaskan pada tahun 2010 sampai 2021 produk domestik regional bruto setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas dan permasalahan yang sudah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021"**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, namun jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tinggi. Hal tersebut menjadi suatu masalah yang belum dapat teratasi karena kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan

diantaranya memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan uraian tersebut maka timbul perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.
  - b. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.
  - d. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto secara

bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dalam penambah wawasan sekaligus informasi baru perihal analisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan baru bagi peneliti khususnya terkait Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penjabaran atas pengamatan mampu dipergunakan sebagai referensi ke depan dengan penelitian serupa.